



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MOROTAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GAMARIA DODUNGO**
2. Jabatan : **PANITERA**
3. NHK : **108925**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/136 m2 di HALMAHERA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 840 m2 di HALMAHERA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di HALMAHERA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOBIL, SUZUKI ST 1150-PICK UP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 530.700.000

III. HUTANG Rp. 180.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

350.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.